

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Anjani, Eka Sintala Dewi *et al.* 2014. *Faktor Penentu Belanja Modal dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan.
- Anjani, Eka Sintala Dewi *et al.* 2015. *Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi 11 No 1.
- Arumsari, Dian. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2013*. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret.(Dipublikasikan).
- Apriana, Dina dan Suryanto, Rudi. 2010. *Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol 11 No. 1. Hal. 68-79.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Darmastuti, Dewi dan Setyaningrum D. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Jakarta. <http://www.djpk.depkeu.go.id/ebook/buku/book/28-buku-diskripsi-dan-analisis-apbd-2014/2-buku>. diakses tanggal 10 Maret 2017.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Vol. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, Abdul, and Theresia W Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Handayani. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).
- Hood, C. 1991. *A Public Management for All Season*. Royal Institue Public Administration Journal. Volumen 69. 1:1-31. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.461.715> diakses tanggal 9 Maret 2017.
- Hoesada, Jan. 2015. *Risiko Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah*. <http://www.ksap.org/sap/risiko-fiskal-pemerintah-pusat-dan-daerah/> diakses tanggal 8 Agustus 2017.
- Indonesian Curroption Watch*. 2015. <http://news.detik.com/berita/d-2854686/di-2014-jumlah-kepala-daerah-yang-jadi-tersangka-korupsi-naik-dan-ini-afiliasi-politiknya>. Diakses tanggal 6 Mei 2017.
- Indriyani. 2016. *Pengaruh PDRB dan Aset terhadap Penerimaan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi XVI: 130-149.
- Iqbal, Muhammad.2015. *Pengaruh Opini BPK terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).
- Julitawati, Ebit, Darwanis, and Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hal. 15-29.
- Jiwatami, Sandhyakalaning.2013.*Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012)*.Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online). <http://kbbi.web.id/>. diakses tanggal 1 Maret 2017.
- Kementerian Dalam Negeri.2014. *Daftar Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia sampai dengan tahun 2014*.

- <http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/totalDOB.pdf>. diakses tanggal 3 Maret 2017.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. <http://litbang.kemendagri.go.id/banyak-kabupatenkota-di-indonesia-tidak-mampu-laksanakan-otonomi/>. Diakses tanggal 25 Maret 2017.
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Anggota DPRD periode 2014-2019*. <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/349/Anggota-DPRD-Periode-2014-2019/NzE0>. diakses tanggal 5 Maret 2017.
- Kuncahyono, Heru. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah di Jawa Timur*. Skripsi. Sarjana Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (Dipublikasikan).
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawardhani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- . 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manggarani, Yanti. 2015. *Pengaruh Opini Audit dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2014*. Skripsi. Sarjana Akuntansi Universitas Jenderal Soediman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- . 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Marfiana, Nandhya. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Pemeriksaan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Journal & Proceeding Unsoed No. 1 Vol. 1.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikarini, Widya Astuti, dan Debby Fitriyani. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah*

*Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Jurnal dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi 15.

Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Diponegoro Journal of Accounting 1: 1-14.

Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication Number AAT 3266180).

Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. (Dipublikasikan).

Purnama, Wulan Ayu. 2016. *Pengaruh Komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab./Kota di Provinsi Lampung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Badar Lampung. (Tidak dipublikasikan).

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2005. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2005.Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2006. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.. Sekretariat Negara. Jakarta.

- \_\_\_\_\_.2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 08 Tahun 2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima.2003.*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia: Jakartas
- Saragih, Hidayah Asfaro. 2015. Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2011-2012. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sekaran, Uma: Bougie, Roger. 2010. *Research Metods For Business*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Setyaningrum, Dyah and Febrianti Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 9 Nomor 2: 154-170.
- Suhardjanto, dan Yulianingtyas, Rena Rukmita.2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol.8 No. 1. Undip
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Kota di Indonesia. Skripsi*. Sarjana Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (Dipublikasikan).